

# R eplik

*Tajam Beranalisa, Ungkap Realita*

## LAPORAN UTAMA

**QRIS Everywhere: Revolusi atau Diskriminasi terhadap yang "Gaptek"?**

## KUPAS TUNTAS

**Investasi Crypto oleh Anak Muda: Peluang atau Jebakan Finansial?**

**“KEHIDUPAN SERBA ONLINE: ANTARA CUAN, CHAOS, DAN TANTANGAN HIDUP MODERN”**



# KATA PENGANTAR

---

## SALAM SEMANGAT JUANG PERS MAHASISWA!

Sebagai masyarakat dan mahasiswa di era digital yang terus berkembang ini, kita tidak lepas dari dunia online dan platform digital yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini merupakan hal yang wajar, yakni beroperasinya berbagai aplikasi finansial, media sosial, dan marketplace yang telah mengubah cara kita bekerja, berbisnis, dan mengelola keuangan. Namun, dibalik berbagai kemudahan tersebut, tersembunyi berbagai tantangan yang perlu kita pahami lebih mendalam sebagai mahasiswa yang cerdas dan kritis.

Replik yang kami gagas ini menjadi sarana untuk membuka satu persatu lapisan dari kehidupan serba online yang kita jalani. Kami mencoba menguak satu demi satu dari berbagai sudut pandang, mulai dari fenomena fintech yang memudahkan transaksi, gig economy yang mengubah pola kerja, hingga investasi digital yang menjanjikan keuntungan besar dengan risiko yang tersembunyi. Semua itu merupakan potret nyata dari dinamika kehidupan modern yang kompleks dan penuh dengan celah abu-abu.

Kami percaya, melalui jemari tangan yang di ejawantahkan dalam replik ini, bisa memantik mahasiswa untuk dapat berpikir lebih aktif, dinamis, dan kritis juga peka terhadap lingkungan sekitar, karena cepat atau lambat kita akan tergabung didalamnya.

Tapi sebagai penulis yang tak luput dari kekurangan, tentu saja ini bukan jawaban final, masih perlu banyak diskusi maupun perdebatan yang bisa pembaca sampaikan. Dan tentunya kami selaku penulis ruang dinamika ini mengharap kritik dan saran dari pembaca kami sebagai pembelajaran dan perbaikan kedepannya.

Semoga Replik ini bisa menerangi pembaca dalam berbagai hal mengenai Kehidupan Serba Online: Antara Cuan, Chaos, dan Tantangan Hidup Modern.

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu dalam penyusunan Replik Volume III ini. Semoga, Replik Volume III ini tidak hanya menjadi bahan bacaan, melainkan mampu menjadi jendela pikiran, sumber inspirasi, dan kontribusi kecil yang bermakna bagi kehidupan.

Akhir kata, Terima kasih.

Redaktur Pelaksana

Ibrena Maria Quinta Karo Karo

# STRUKTUR ORGANISASI

---

- **Pembina:** Mochammad Azhar, S.H., LL.M.
- **Dewan Redaksi:** Adi Tri Prasetyo, Siska Utami, Nadia Yudistira Silalahi, Shella Amelia Putri, Hanifah Febri Annisa, Putri Restianingsih, Nur Sopiah, Devio Nabila Ernanta Arsianti, Calvin Syahputra Saragih
- **Pemimpin Umum:** Rizki
- **Wakil Pemimpin Umum:** Dhiyaa Ulhaq Musyaffa Kartika
- **Sekretaris Umum:** Syauqina Fildzah Hanifa
- **Bendahara Umum:** Nor Chanifah Laila
- **Pemimpin Redaksi:** Fildzah Shafa Ghani
- **Redaktur Pelaksana Media Online:** M. Fajar Rusyidi
- **Redaktur Pelaksana Artistik:** Amellia Rachmayanti
- **Redaktur Pelaksana Jurnal:** Amando Sahata Sinaga
- **Redaktur Pelaksana Replik Volume I:** Amellia Rachmayanti
- **Redaktur Pelaksana Replik Volume II:** Akhmad Saddam Arrummy
- **Redaktur Pelaksana Replik Volume III:** Ibrena Maria Quinta Karo Karo
- **Staf Redaksi:** Tessa Vena Pasaribu, Dungo Robintang I. Situmeang, Dimas Irfak Tabrani, Ryan Anugerah Rafael
- **Pemimpin PSDM:** Tiara Raudhatul Jannah
- **Staff PSDM:** Aaliyah Davalyn Setiawan, Faqih Nuris Shiba, Anisa Kolda Kusumajati, Arinnda Meyputri, Alya Mufidah, Fauziah Kauri Muhajir, Jihan Nailah Rahmadina
- **Pemimpin Litbang:** Sonny Kusuma Wijayanto
- **Staf Litbang:** Gola Arpanji Cahyono, Nasywa Julia Tiaradevi, Elcha Erdiana Salsabila, Azarine Naila, Alda Hamidatuz Zahrah, Nabila Abhista Sahlaa, Aulia Yusuf Ramadhani Sindaru, Muhammad Rizki Juniarto, Dela Rahmatul Wafa
- **Pemimpin Humas:** Bening Fauziyyah Auliya Arifan
- **Staf Humas:** Chaezarani Hijrinalis, Hilda Hirziyani, Elisabeth Efriani, Petra Permana Putra, Ristianti Simatupang, Rahma Alfika, Erma Suryani Situmorang, Rieva Christy Sinaga
- **Pemimpin Perusahaan:** Fadilla Zahrah Maulidia
- **Staf Perusahaan:** Callysta Tsania Farah Arifin, Hasna Afifah Haris, Sapta Noferiantika, Restu Adha Wahidha, Ammara Essy Alya

# DAFTAR ISI

---

## LAPORAN UTAMA

5

"Qris Everywhere: Revolusi atau Diskriminasi Terhadap yang "Gaptek"?"

## KUPAS TUNTAS

13

"Investasi Crypto oleh Anak Muda: Peluang atau Jebakan Finansial?"

## ANGKAT SUARA

21

"Driver Online 24/7: Freedom Fighter atau Modern Slavery?"

9

## LAPORAN KHUSUS

"Pinjol dan Paylater: Solusi Instan atau Malapetaka Finansial?"

17

## PRO DAN KONTRA

"Fenomena Hybrid Working: Inovasi Fleksibel atau Tekanan Baru?"

26

## SUDUT PANDANG

"E-Commerce vs Offline Store: Persaingan atau Peluang Usaha?"

# LAPORAN UTAMA

## QRIS EVERYWHERE: REVOLUSI ATAU DISKRIMINASI TERHADAP YANG "GAPTEK"?

Dalam hal kemajuan teknologi perbankan, Indonesia dapat dikatakan menjadi salah satu negara dengan perkembangan perbankan paling maju dan adaptif. Hal ini terbukti dari berbagai inovasi yang terus dilakukan oleh dunia perbankan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk inovasi yang saat ini paling populer dan banyak digunakan oleh masyarakat adalah sistem pembayaran berbasis QRIS, yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam setiap transaksi keuangan.



Sumber: Interactive QRIS

Mengutip dari Bank Indonesia, "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau biasa disingkat QRIS (dibaca "Kris") merupakan standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia".

Berkat penggunaan QRIS ini, masyarakat tidak perlu membawa dompet ataupun kartu dalam transaksi di kehidupan sehari-hari. Cukup dengan memindai barcode yang disediakan dari ponsel, dan Selamat!! Saldo sebesar XXX rupiah telah terpotong dari rekening Anda!

Perkembangan QRIS semakin hari kian menunjukkan perkembangan yang pesat. Terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran. Tidak hanya toko-toko besar saja, bahkan toko kelontong di pinggir jalan pun banyak yang sudah menjadikan QRIS sebagai metode pembayarannya.

Meskipun penggunaan QRIS yang semakin inklusif memberikan banyak manfaat, terutama dari segi kemudahan dan kepraktisan, namun seperti dua sisi mata uang, inovasi ini juga memiliki kekurangan yang patut diperhatikan. Salah satu aspek yang sering terabaikan adalah kelompok orang tua yang kerap mengalami kesulitan beradaptasi karena keterbatasan dalam memahami teknologi atau yang dikenal dengan istilah gaktek.

Mungkin bagi kita, penggunaan QRIS adalah hal simple yang tidak merumitkan dalam penggunaannya, tetapi, bagi para orang tua yang sejak dulu tidak terbiasa dengan penggunaan gadget, ini merupakan hal yang rumit dan membingungkan, sehingga mereka seringkali menolak untuk menggunakan atau bahkan mencoba memahami tentang penggunaan QRIS.

Perkembangan teknologi sayangnya juga turut membawa akibat negatif. Berkembangnya teknologi = berkembangnya pula inovasi modus-modus penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih, marak sekali orang-orang tidak bertanggung jawab yang melakukan aksi penipuan secara online, hal ini pula yang menjadikan para orang tua kian takut dan enggan untuk menggunakan teknologi.



Selain itu, banyak pedagang, khususnya dari kalangan orang tua, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan QRIS secara tepat karena keterbatasan pemahaman terhadap teknologi. Kondisi ini sering kali menjadi pertimbangan bagi calon pembeli ketika hendak bertransaksi. Tak jarang, masyarakat memilih untuk tidak berbelanja di tempat yang belum menyediakan layanan pembayaran melalui QRIS. Kemudian, semakin banyak pula masyarakat yang kini bergantung sepenuhnya pada sistem pembayaran digital, hingga enggan membawa uang tunai maupun kartu saat bepergian. Fenomena ini menunjukkan munculnya pola kebiasaan baru di tengah masyarakat, yaitu pergeseran menuju cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai.



Sumber: Kompasiana.com

Fenomena ini juga semakin didukung dengan berkembangnya QRIS di berbagai sektor, tidak hanya pada sektor perbelanjaan seperti minimarket atau toko kelontong, di sektor pengisian bahan bakar (SPBU), kini juga sudah mulai tersedia layanan pembayaran menggunakan QRIS, meskipun penerapannya masih belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, perkembangan penggunaan QRIS juga sudah sampai pada sektor parkir. Fenomena parkir memang seringkali dianggap menyebalkan oleh masyarakat, terlebih ketika biaya parkir tidak sebanding dengan layanan yang diberikan atau ketika tukang parkir hanya menerima uang parkir customer lalu melenggang pergi. Kini, mulai banyak tukang parkir yang menyediakan QRIS untuk metode pembayaran, sehingga orang-orang yang sebelumnya enggan membayar parkir sudah tidak bisa berdalih tidak membawa cash untuk menghindari pembayaran.

Namun, meskipun sudah berkembang pesat dan menuju inklusivitas digitalisasi perbankan, nyatanya QRIS belum terjangkau di semua wilayah. Banyak wilayah terpencil yang belum terjangkau QRIS. Salah satunya ialah fasilitas jaringan internet yang sangat kurang memadai. Selain itu, kurangnya fasilitas perbankan dan pengetahuan digital juga menjadi faktor mengapa di daerah terpencil masih terjadi kesenjangan transaksi perbankan digital.

Situasi tersebut menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat lansia dengan literasi digital rendah dan masyarakat daerah terpencil untuk merasakan teknologi yang harusnya inklusif ini. QRIS bukan hanya peralihan transaksi konvensional menjadi transaksi digital saja, melainkan perlu adanya pemahaman terkait cara kerja, kebijakan data dan privasi, serta kewaspadaan dengan adanya penipuan-penipuan yang kian berkembang mengikuti perkembangan teknologi.

Sebenarnya, tantangan penggunaan QRIS tidak hanya terletak pada belum meratanya jangkauan pengguna hingga ke pelosok negeri. Tetapi, penggunaan QRIS secara masif ini juga mendatangkan berbagai macam resiko pada privasi dan keamanan data pengguna. Dari segi keamanan, potensi ancaman seperti manipulasi kode (QR spoofing) dimana para pelaku kejahatan mengganti kode QR resmi dengan kodenya sendiri dan mengalihkan dananya ke rekening pribadi mulai marak terjadi.

Selain modus penipuan QR spoofing, pencurian data pribadi juga sering terjadi belakangan ini. Pencurian data pribadi biasanya terjadi melalui penyebaran link palsu, aplikasi tiruan, atau situs pembayaran palsu yang menyerupai situs asli. Pengguna seringkali tidak sadar bahwa link yang dikirimkan adalah link yang berbahaya, sehingga mengklik link yang dikirim tersebut tanpa berpikir apakah link tersebut merupakan link yang resmi atau tidak. Dalam beberapa kasus, korban yang memindai QR yang diberikan oleh si penipu dapat mengakibatkan akun bank teretas dan beralih ke tangan pelaku, sehingga mengakibatkan uang yang berada di tabungan lenyap begitu saja. Selain itu, yang lebih berbahaya lagi, pelaku dapat menggunakan akun tersebut untuk melakukan transaksi ilegal tanpa sepengetahuannya.

Untuk mengatasi permasalahan penipuan yang terjadi sekaligus menjembatani kesenjangan digital dalam proses penyebaran QRIS secara merata, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu aksi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah "Pemerataan Infrastruktur". Hal ini merupakan sebuah permasalahan yang sejak dulu dibahas, namun, hingga kini tak kunjung selesai dan terus menjadi topik yang sering dibicarakan entah sampai kapan. Pemerintah sudah selayaknya mengencangkan pemerataan infrastruktur terutama akses internet ke daerah-daerah terpencil, terlebih, internet merupakan hal yang sudah menjadi kebutuhan pokok mengingat perkembangan dunia yang serba digital ini, dan kita tidak bisa membiarkan mereka yang berada di daerah terpencil tertinggal begitu saja.



Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadarannya akan bahaya-bahaya yang mengintai secara online dengan meningkatkan kehati-hatian dalam bertransaksi. Seperti, memverifikasi keaslian kode QR, keaslian domain web dan juga mewaspadaai setiap nomor-nomor tidak dikenal yang mencoba menghubungi dan/atau terlihat mencurigakan. Peran pemerintah disini juga diperlukan, dengan meningkatkan sistem keamanan digital nasional, melakukan pengawasan secara berkala, dan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs internet yang melanggar ketentuan hukum.

Dengan demikian, perkembangan teknologi QRIS seharusnya tidak difokuskan kepada kepraktisan dan kecepatan aksesnya saja, melainkan keamanan data penggunaannya dan juga pemerataan akses QRIS bagi seluruh masyarakat. Pemasifan QRIS ini juga harus dibekali dengan tameng keamanan digital, agar tidak ada kerugian lagi yang harus dirasakan oleh masyarakat. Edukasi berkelanjutan serta perlindungan data yang ketat juga dapat dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, diharapkan setiap individu termasuk para orang tua dan pelaku UMKM di daerah terpencil dapat memanfaatkan QRIS dengan aman dan nyaman.

**PENULIS:**

**AMELLIA RACHMAYANTI**

# LAPORAN KHUSUS

## PINJOL DAN PAYLATER: SOLUSI INSTAN ATAU MALAPETAKA FINANSIAL?

Perkembangan teknologi dan informasi mengalami pertumbuhan yang begitu pesat dan berdampak signifikan dalam pola interaksi masyarakat di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, munculnya inovasi yang beragam melahirkan perkembangan teknologi finansial atau financial technology (fintech) yang memberikan dampak besar dalam sistem keuangan dengan membawa sebuah layanan pinjaman online (pinjol) dan fitur pembayaran tertunda (paylater) di tengah kalangan generasi muda dan sangat diminati oleh Gen Milenial dan Gen Z yang tumbuh di era teknologi.



Sumber: Umroh.com

Sistem ini hampir sama dengan kartu kredit, namun perbedaannya ialah paylater dapat diakses dengan lebih mudah. Banyak generasi muda yang beralih kedalam kedua metode pembayaran tersebut karena selain prosesnya yang praktis dan cepat, mereka juga seringkali menghadapi tekanan ekonomi dan kebutuhan gaya hidup yang melebihi kemampuan finansial mereka. Pinjaman online dan paylater menawarkan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara instan, meskipun terkadang tidak memperhatikan risiko yang akan ditimbulkan.

Proses kerja pinjaman online dimulai dari tahap pendaftaran dan verifikasi data pribadi. Calon peminjam diharuskan mengisi formulir pendaftaran dengan menyertakan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor rekening bank, serta informasi pekerjaan dan pendapatan. Setelah data diunggah, sistem platform akan memprosesnya untuk menilai kelayakan calon peminjam. Proses ini menggantikan metode analisis manual yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.



Sumber: Radar Metro

Pinjaman online atau (pinjol) adalah layanan keuangan yang memungkinkan individu untuk meminjam uang melalui platform digital tanpa harus melalui proses yang rumit, sedangkan sistem pembayaran tertunda (paylater) ialah salah satu metode pembayaran yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk berbelanja terlebih dahulu dan membayar kemudian, biasanya dalam jangka waktu tertentu.

Setelah data diverifikasi, pengguna dapat memilih jumlah pinjaman serta tenor pembayaran yang diinginkan. Platform kemudian akan menentukan bunga pinjaman berdasarkan profil pengguna. Jika pengajuan disetujui, dana akan langsung ditransfer ke rekening peminjam hanya dalam hitungan jam atau bahkan menit. Proses ini menjadi keunggulan utama pinjol dibandingkan sistem perbankan tradisional yang memerlukan waktu lebih lama. Selanjutnya, peminjam wajib melakukan pengembalian dana beserta bunga dan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran biasanya dilakukan melalui transfer bank, dompet digital, atau virtual account yang disediakan oleh platform. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, peminjam akan dikenai denda tambahan.

Berbeda dengan pinjaman online, paylater memiliki mekanisme yang lebih sederhana karena layanan ini banyak ditemukan di platform e-commerce dan marketplace digital seperti Shopee, Tokopedia, GoJek, maupun Traveloka. Mekanisme kerja paylater dimulai dari proses pendaftaran dan penilaian kelayakan pengguna. Platform akan menilai riwayat transaksi, perilaku belanja, dan kemampuan finansial pengguna berdasarkan data digital mereka. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menentukan limit kredit paylater yang dapat digunakan oleh pengguna. Proses penilaian ini dilakukan secara otomatis yang memungkinkan penentuan limit kredit secara cepat dan akurat. Ketika pengguna melakukan transaksi, mereka dapat memilih opsi "Bayar Nanti" atau "Cicilan" di aplikasi. Setelah transaksi dikonfirmasi, platform paylater akan langsung membayar ke penjual atau merchant, sedangkan pengguna berkewajiban membayar kembali kepada platform dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk berbelanja tanpa harus memiliki dana tunai di awal.



Kedua platform ini menjawab kebutuhan masyarakat modern terhadap akses keuangan yang praktis dan cepat. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui secara mendalam bagaimana kedua layanan tersebut memberikan dampak positif dan negatif sekaligus risiko sosial ekonominya. Dampak positifnya berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan formal. Melalui layanan pinjaman online, masyarakat dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah dapat dengan mudah memperoleh pinjaman tanpa memiliki jaminan yang besar. Pinjol dan paylater mendorong peningkatan transaksi di sektor e-commerce dengan meningkatkan daya beli konsumen dan memperluas jangkauan pasar sehingga sirkulasi uang di pasar digital semakin maju, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa kedua layanan tersebut membantu masyarakat dalam mengatur arus keuangan (cash flow). Fenomena tersebut menjadi potensi besar bagi industri pinjol dan paylater untuk terus berkembang dan menimbulkan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.



Sumber: Corporate Finance Institute

Di sisi lain, terdapat pula beberapa dampak negatif dari pinjol dan paylater, diantaranya adalah, masyarakat yang menggunakan layanan pinjol tanpa memahami konsekuensi bunga tinggi atau tenggat waktu pengembalian yang ketat, mengakibatkan tidak sedikit pengguna terjatuh dalam lingkaran utang yang sulit dilunasi. Hal ini diperburuk oleh maraknya pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dari OJK dan sering kali menggunakan cara penagihan yang tidak etis bahkan adanya ancaman kebocoran data pribadi yang mengandung unsur kekerasan dan pelanggaran privasi. Selain itu, dengan semakin banyak masyarakat yang mengetahui kedua layanan tersebut, maka akan mendorong pola hidup konsumtif dan impulsif dalam berbelanja terutama di kalangan generasi muda yang cenderung mudah tergiur oleh promosi digital yang mengakibatkan ketergantungan pada utang dan memengaruhi stabilitas keuangan pribadi. Peningkatan jumlah pengguna pinjol dan paylater juga dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan nasional karena meningkatnya kredit macet digital dan menurunnya kepercayaan publik terhadap fintech.



Sumber: Shutterstock

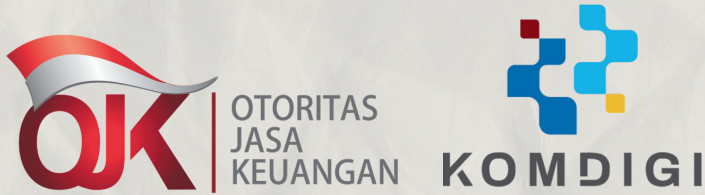
Selain itu, kemudahan yang dinikmati oleh pengguna layanan pinjol dan paylater, dapat memengaruhi cara berpikir dan pola emosi seseorang. Salah satu dampak yang paling nyata ialah munculnya ilusi kemampuan finansial. Ketika seseorang merasa dapat dengan mudah mengakses dana kapanpun dibutuhkan, muncul persepsi bahwa ia memiliki kapasitas kemampuan ekonomi yang lebih besar dari kenyataannya. Hal ini mendorong pengambilan keputusan yang impulsif dan ketergantungan psikologis terhadap utang karena mereka menganggap kredit sebagai solusi cepat atas setiap masalah keuangan.

Dari sisi emosional, banyak pengguna layanan pinjol dan paylater mengalami stress dan kecemasan finansial akibat beban tagihan yang menumpuk. Kondisi tersebut dapat mengarah pada gangguan mental ringan hingga berat. Kebiasaan perilaku konsumtif dalam masyarakat khususnya generasi muda menimbulkan distorsi sosial dan budaya, dimana status sosial diukur melalui kepemilikan barang, bukan kemampuan finansial. Perilaku konsumtif dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan finansial jangka panjang karena selalu hidup dibawah bayang-bayang hutang.

Banyak kasus dimana kreditur atau perusahaan pinjaman terutama fintech ilegal melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan hukum. Contoh kasusnya ketika Ningrum (nama samaran), menjadi korban penyebaran data pribadi oleh debt collector AdaKami ke semua kontakannya. Ningrum memiliki tagihan pinjol hingga Rp 80 juta, padahal ia hanya meminjam tak sampai Rp 20 juta. Selain data pribadi disebar, Ningrum juga diteror dengan konten pornografi oleh penagih utang. Fotonya diedit dengan gambar perempuan telanjang. Ibunya terus diteror telepon dan diancam Ningrum akan dibunuh. (sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dy.geeyo>)

Tindakan tersebut melanggar hak privasi konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kode Etik Penyelenggara Fintech Lending (AFPI). Maka dari itu, edukasi literasi keuangan merupakan langkah preventif dalam menghadapi risiko utang digital yang semakin marak di era fintech. Setiap orang harus memiliki kemampuan dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan dengan bijak.

Melalui edukasi, masyarakat diajarkan untuk memahami bahwa setiap layanan digital memiliki konsekuensi hukum dan finansial jangka panjang. Pemerintah, OJK, Komdigi, dan Lembaga Pendidikan memiliki peran strategis untuk memperluas jangkauan edukasi agar manfaat fintech dapat dirasakan secara positif tanpa menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Literasi keuangan digital yang baik merupakan fondasi utama menuju masyarakat digital yang sejahtera.



Selain itu, edukasi juga berperan penting dalam mencegah masyarakat terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal yang kerap melakukan penagihan secara tidak etis dan melanggar hak konsumen. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting, terutama melalui sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta lembaga pendidikan. Ketiga pihak tersebut memiliki tanggung jawab untuk memperluas jangkauan literasi keuangan digital melalui program sosialisasi, kurikulum pendidikan, maupun kampanye publik yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan layanan fintech.

Dengan demikian, literasi keuangan digital yang kuat bukan sekadar kemampuan memahami produk keuangan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat digital yang inklusif dan sejahtera. Upaya peningkatan literasi ini akan menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat, beretika, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

**PENULIS:**

**FAUZIAH KAURI MUHAJIR**





Untuk mengendalikan pesatnya perkembangan aset kripto, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi serta ketentuan hukum yang mengatur aktivitas perdagangan crypto. Berdasarkan Peraturan Bapebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, mata uang kripto di Indonesia diklasifikasikan sebagai komoditas digital, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, crypto hanya dapat digunakan sebagai instrumen investasi, sementara transaksi barang dan jasa di dalam negeri tetap wajib menggunakan rupiah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Bapebti juga mewajibkan agar transaksi crypto hanya dilakukan di bursa dan platform resmi yang diawasi pemerintah, dengan ketentuan bahwa setiap aset memiliki nilai ekonomi dan legitimasi teknologi yang kuat. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah penipuan serta melindungi masyarakat dari investasi berisiko tinggi. Sementara itu, Bank Indonesia dan OJK tidak memiliki otoritas langsung terhadap perdagangan crypto, dan BI secara tegas melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran. Pemerintah melalui PPAK juga mengawasi aktivitas crypto dengan prinsip anti pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT) agar teknologi ini tidak dimanfaatkan untuk kejahatan keuangan.

Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan inovasi dan perlindungan publik. Bagi generasi muda, memahami regulasi ini menjadi syarat penting untuk berinvestasi secara bijak dan legal, mengingat crypto bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga mengandung risiko finansial yang nyata.



Aset crypto juga menawarkan bentuk investasi yang berbeda secara mendasar dibandingkan produk keuangan tradisional seperti saham, reksa dana, atau deposito. Di Indonesia, crypto tidak dikategorikan sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai komoditas digital yang diawasi oleh Bapebti, sedangkan saham dan instrumen konvensional lainnya berada di bawah pengawasan OJK. Perbedaan paling mencolok terlihat dari tingkat fluktuasi harga. Nilai crypto dapat naik atau turun secara drastis dalam waktu singkat, sementara instrumen konvensional cenderung lebih stabil karena dipengaruhi kondisi ekonomi riil dan kinerja korporasi. Selain itu, nilai crypto tidak bersandar pada kinerja perusahaan tertentu, melainkan pada permintaan pasar dan opini publik global. Kelebihan lain dari crypto adalah kemudahan akses. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, seseorang sudah dapat berinvestasi tanpa prosedur administrasi rumit seperti pembuatan rekening efek. Namun, sifat anonim dan terdesentralisasi dari pasar crypto membuatnya lebih rawan terhadap manipulasi pasar dan tindakan ilegal, seperti praktik pencucian uang.

Meskipun tergolong berisiko tinggi, cryptocurrency tetap memberikan peluang besar bagi generasi muda yang berani mengambil langkah inovatif. Daya tarik utamanya terletak pada potensi keuntungan yang tinggi. Aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum telah menunjukkan pertumbuhan nilai yang signifikan dalam jangka panjang. Lebih dari sekadar instrumen investasi, munculnya ekosistem baru seperti Decentralized Finance (DeFi), Non-Fungible Token (NFT), serta blockchain gaming menghadirkan peluang ekonomi baru di ranah digital, mulai dari investasi proyek hingga pekerjaan di sektor Web3. Selain memberikan potensi keuntungan, keterlibatan dalam investasi crypto juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk memahami dan menguasai teknologi keuangan masa depan. Pengetahuan mengenai blockchain dapat menjadi keunggulan kompetitif di tengah percepatan transformasi digital global. Namun, potensi ini hanya dapat dimaksimalkan apabila disertai dengan tingkat literasi keuangan dan strategi investasi yang matang.

Sayangnya, popularitas crypto juga dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan investasi. Banyak kasus terjadi dengan modus scam yang menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko. Misalnya, kasus Binary Option dan DNA Pro Akademi yang sempat viral di Indonesia, di mana ribuan korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah karena tergiur iming-iming "cuan cepat." Modusnya sering kali menggunakan nama aset crypto atau robot trading palsu untuk menarik kepercayaan investor. Penipuan semacam ini menunjukkan bahwa banyak anak muda masih belum memahami perbedaan antara investasi legal yang diatur oleh Bappebti dan penawaran ilegal tanpa izin. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa izin platform dan aset yang diperdagangkan, serta tidak mudah percaya pada promosi yang menjanjikan keuntungan pasti.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di pasar crypto, generasi muda perlu membekali diri dengan pengetahuan finansial dan literasi digital yang memadai. Pemahaman tentang mekanisme kerja blockchain, karakteristik berbagai jenis aset kripto, tingkat volatilitas harga, serta strategi manajemen risiko menjadi hal yang wajib dikuasai. Pemerintah melalui lembaga seperti Bappebti, OJK, dan berbagai institusi edukasi keuangan telah melaksanakan program literasi keuangan digital untuk mencegah masyarakat, terutama anak muda, agar tidak terjebak dalam praktik investasi ilegal atau penipuan. Calon investor juga perlu mengembangkan pola pikir investasi jangka panjang, bukan sekadar berorientasi pada keuntungan cepat. Kesadaran akan pentingnya diversifikasi portofolio, kebiasaan melakukan riset mendalam sebelum membeli aset, dan memahami whitepaper setiap proyek kripto merupakan bentuk tanggung jawab pribadi dalam berinvestasi secara cerdas.

Investasi crypto yang memiliki sifat spekulatif dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan finansial generasi muda apabila dilakukan tanpa kendali dan perencanaan yang matang. Fluktuasi harga yang tinggi sering kali memicu stres keuangan, tindakan impulsif, bahkan kecenderungan untuk kecanduan aktivitas trading. Banyak investor muda mengalami tekanan psikologis akibat kerugian besar yang disebabkan oleh keputusan investasi jangka pendek tanpa pertimbangan rasional. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat mengikis perilaku keuangan yang sehat seperti menabung, membangun dana darurat, dan berinvestasi secara berkelanjutan. Karena itu, diperlukan keseimbangan antara keberanian mencoba inovasi dan kedisiplinan finansial. Crypto sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya instrumen investasi, melainkan hanya bagian kecil dari portofolio yang terdiversifikasi.



Investasi cryptocurrency di kalangan generasi muda merupakan fenomena dengan dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, aset digital ini membuka peluang besar bagi anak muda untuk memperoleh keuntungan finansial, menguasai teknologi keuangan masa depan, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi. Namun di sisi lain, pasar crypto juga menyimpan berbagai risiko, mulai dari volatilitas harga yang tinggi hingga praktik penipuan yang mengatasnamakan investasi digital. Oleh karena itu, crypto bukanlah jalan instan menuju kekayaan, melainkan instrumen keuangan yang menuntut pemahaman mendalam dan sikap kehati-hatian. Anak muda perlu memperkuat literasi finansial serta berpikir kritis terhadap tren investasi yang sedang populer. Dengan pemahaman dan strategi yang tepat, crypto dapat menjadi peluang yang menguntungkan, bukan jebakan finansial yang merugikan.

**PENULIS:**  
**HASNA AFIFAH HARIS**

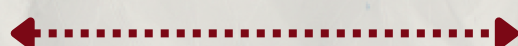
# PRO KONTRA

## FENOMENA HYBRID WORKING: INOVASI FLEKSIBEL ATAU TEKANAN BARU?



Hybrid working merupakan model usaha yang mengkombinasikan bekerja di kantor (work from office) dan bekerja dari rumah (work from home), yang memberikan fleksibilitas bagi karyawan untuk menyeimbangkan kehadiran fisik (lokasi) dengan koneksi digital. Penerapan konsep kerja ini menjadi solusi ketika pandemi COVID-19 telah secara fundamental mengubah cara manusia bekerja. Pembatasan sosial yang ketat pada tahun 2020, ketika krisis kesehatan global saat itu memaksa perusahaan untuk menguji dan membuktikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif di luar kantor. Perubahan budaya kerja darurat ini kemudian diadopsi permanen karena terbukti mampu meningkatkan work-life balance dan produktivitas karyawan sekaligus mengurangi biaya operasional perusahaan. Selain menjadi respons adaptif terhadap krisis, model ini juga membuka peluang baru bagi dunia kerja untuk menerapkan teknologi komunikasi dan kolaborasi digital secara lebih luas.

Fenomena perubahan budaya kerja tersebut merupakan cerminan dari transformasi digital global yang dipercepat. Saat ini, lebih dari setengah perusahaan global telah menerapkan sistem hybrid sebagai skema kerja permanen mereka. Di Indonesia, penerapan sistem kerja fleksibel ini juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari We Are Social (2025), jumlah pekerja yang mengadopsi model remote dan hybrid di tanah air terus meningkat dan menunjukkan peningkatan sebesar 30% dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Peningkatan ini mencerminkan permintaan yang kuat dari tenaga kerja Indonesia terhadap fleksibilitas. Selain itu, adopsi kerja hybrid juga memperlihatkan pergeseran nilai di masyarakat, di mana kinerja kini lebih diukur dari hasil kerja (output) daripada kehadiran fisik di kantor. Perubahan ini menunjukkan bahwa dunia kerja mulai bergerak menuju sistem yang lebih dinamis, adaptif, dan berbasis teknologi.



Namun, sistem kerja ini memunculkan dua sisi pandangan yang berbeda. Sebagian besar menyebut hybrid working sebagai "inovasi fleksibel" yang memberikan dampak positif bagi para pekerja dan bagi perusahaan. Salah satu keunggulan dari sistem hybrid working, yaitu fleksibilitas dalam menentukan tempat, waktu dan juga mengurangi ongkos sehingga secara tidak langsung pekerja bisa lebih hemat. Pekerja dapat menyesuaikan aktivitas profesional mereka dengan kebutuhan pribadi, sehingga meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi (work-life balance).



Selain itu, perusahaan juga mendapatkan manfaat signifikan dari efisiensi biaya operasional. Dengan mengurangi kebutuhan seperti ruang kantor, biaya listrik, dan transportasi, banyak perusahaan mampu menekan pengeluaran tanpa menurunkan performa kerja. Model hybrid juga memungkinkan perusahaan merekrut talenta terbaik tanpa batas geografis, dimana pegawai dapat bekerja dari luar kota, bahkan luar negeri, tanpa hambatan administratif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Manajemen dan Organisasi IPB (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan sistem kerja hibrida di perusahaan Indonesia mampu meningkatkan produktivitas karyawan hingga 25%, terutama karena adanya efisiensi waktu dan pengurangan beban perjalanan harian. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa fleksibilitas dalam lokasi kerja tidak hanya berdampak positif terhadap keseimbangan hidup, tetapi juga berkontribusi nyata pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.



Dalam konteks produktivitas, studi oleh Bloom et al. (2024) yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa penerapan hybrid working dapat meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan tingkat pengunduran diri (quit rate) hingga sepertiga. Data ini menegaskan bahwa fleksibilitas kerja tidak hanya berdampak positif bagi individu, tetapi juga bagi stabilitas tenaga kerja di dalam perusahaan.

Sementara itu, beberapa pihak menyebut sistem kerja ini adalah "tekanan baru" yang berdampak negatif baik bagi para pekerja maupun perusahaan. Meskipun menjanjikan fleksibilitas, hybrid working menciptakan seperangkat tantangan baru yang mengancam kesejahteraan psikologis dan keadilan organisasi, jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem kerja hybrid adalah hilangnya batas yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, yang dapat menyebabkan kelelahan kerja (burnout) dan menurunkan kesejahteraan mental karyawan. Banyak karyawan kesulitan membedakan waktu kerja dan waktu istirahat karena adanya tuntutan untuk "selalu online" dan tersedianya akses digital tanpa batas. Microsoft Indonesia News Center (2022) menunjukkan bahwa 66% pekerja di Indonesia cenderung memilih pola kerja hybrid atau remote, sementara 60% pemimpin perusahaan justru menginginkan kembali ke sistem kerja penuh di kantor (work from office). Ketimpangan persepsi ini menimbulkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan.

Selain itu, muncul pula masalah proximity bias dan tantangan koordinasi dalam sistem kerja hybrid. Banyak organisasi gagal merancang kebijakan kerja hybrid yang terstruktur, sehingga muncul kesenjangan antara karyawan yang bekerja di kantor dan yang bekerja dari rumah. Menurut laporan Harvard Business Review (2025), hal ini menimbulkan bias kedekatan (proximity bias), di mana manajer cenderung lebih memperhatikan dan memberikan peluang karier kepada karyawan yang sering hadir di kantor. Akibatnya, pekerja melakukan work from home rentan tertinggal dalam jenjang karier meskipun performa mereka tidak kalah baik. Tsipursky (2023) menegaskan bahwa ketidaksetaraan ini berpotensi menciptakan dua lapisan tenaga kerja (two-tier workforce) yang berimplikasi negatif terhadap keadilan dan motivasi kerja dalam organisasi.

Dari aspek keamanan, hybrid working juga meningkatkan risiko terhadap serangan siber dan kendala infrastruktur digital. Pekerjaan yang dilakukan dari luar kantor membuat perangkat dan jaringan pribadi menjadi titik lemah keamanan. Berdasarkan laporan IBM Cyber Security Index (2023), sekitar 20% serangan siber global berasal dari lemahnya kontrol keamanan pada perangkat yang digunakan pekerja remote. Selain itu, di Indonesia, ketimpangan akses internet dan infrastruktur digital juga memperburuk situasi karena menyebabkan perbedaan produktivitas antar karyawan dan antar wilayah. Meskipun demikian, hybrid working tidak hanya berkaitan dengan di mana seseorang bekerja, tetapi juga, menyangkut bagaimana organisasi mengelola hubungan kerja, membangun budaya kolaboratif, dan menumbuhkan kepercayaan di tengah keterpisahan jarak. Dengan kata lain, tantangan utama dari sistem ini bukan terletak pada teknologinya saja, melainkan pada kesiapan manusia dan organisasi untuk beradaptasi dengan cara kerja baru.

Dengan melihat dua sisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hybrid working bukan sekadar persoalan lokasi kerja, melainkan tantangan manajerial dan budaya organisasi. Ainurrofiq dan Amir (2022) menekankan bahwa keberhasilan penerapan sistem ini bergantung pada kemampuan organisasi untuk membangun budaya berbasis kepercayaan (trust-based culture), bukan pengawasan fisik. Manajer perlu dilatih agar mampu memimpin secara adil di lingkungan kerja yang tersebar, dengan fokus pada hasil kerja dan kolaborasi tim.

Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam melindungi kesejahteraan pekerja di era digital. Kementerian Ketenagakerjaan RI (2023) mengusulkan kebijakan "Hak untuk Memutus Hubungan Digital" (Right to Disconnect), yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja agar tidak dieksploitasi oleh fleksibilitas kerja yang berlebihan. Kebijakan semacam ini sangat relevan untuk memastikan keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan mental di era pasca pandemi.

Hybrid working pada dasarnya adalah fenomena transformasional yang membawa perubahan mendasar dalam paradigma dunia kerja modern. Model kerja ini tidak hanya menuntut adaptasi terhadap penggunaan teknologi digital, akan tetapi juga membawa perubahan dalam pola pikir, sistem manajemen, serta nilai-nilai yang menjadi dasar budaya organisasi. Dalam konteks ini, perusahaan perlu meninjau ulang strategi kerja mereka agar mampu menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas dan produktivitas, tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan karyawan. Adaptasi yang dilakukan tidak cukup hanya bersifat teknis, melainkan juga harus mencakup dimensi sosial dan psikologis agar setiap individu dapat berfungsi secara optimal dalam sistem kerja yang baru ini.

Keberhasilan penerapan hybrid working sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara seluruh pihak, baik perusahaan, pekerja, maupun pemerintah. Perusahaan berperan penting dalam menyediakan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung produktivitas jarak jauh, sementara pekerja dituntut untuk mampu mengelola waktu, komunikasi, dan tanggung jawab dengan tingkat disiplin yang tinggi. Di sisi lain, pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi yang adaptif, seperti perlindungan terhadap kesejahteraan digital dan hak pekerja untuk memutuskan koneksi setelah jam kerja. Dengan adanya kolaborasi yang harmonis antara ketiga pihak tersebut, ekosistem kerja yang adil, sehat, dan berkelanjutan dapat terwujud, sekaligus menjadikan hybrid working sebagai simbol kemajuan dan modernisasi dunia kerja di era digital.

**PENULIS:**

**ERMA SURYANI SITUMORANG**

# ANGKAT SUARA

## DRIVER ONLINE 24/7: FREEDOM FIGHTER ATAU MODERN SLAVERY

Di era perkembangan teknologi saat ini, hadirnya transportasi online menjadi sebuah langkah alternatif masyarakat baik dalam bepergian, pesan makanan, hingga jasa antar barang. Tingginya permintaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi online telah menciptakan peluang kerja baru dengan sistem waktu kerja yang fleksibel, di mana para driver memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri kapan dan berapa lama mereka ingin bekerja. Dengan tersebarnya informasi yang menjanjikan terkait jam kerja yang fleksibel, banyak masyarakat yang tertarik untuk terjun dalam pekerjaan ini. Apalagi saat ini, kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan terjadinya lapangan pekerjaan yang terbatas, sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa menjadi driver online merupakan solusi alternatif untuk mencari nafkah, baik untuk sementara ataupun berkepanjangan.

Namun, dalam praktiknya, fleksibilitas waktu kerja justru membuat para driver bekerja tanpa batas waktu demi mencapai target pendapatan harian. Kondisi ini semakin berat ketika permintaan pasar menurun, seperti di luar jam sibuk atau pada musim sepi, sehingga sering kali tenaga yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh. Hal ini bukan semata-mata dilakukan mereka karena keinginan pada dirinya, melainkan adanya tuntutan ekonomi untuk mencapai penghasilan yang layak.

Selain itu, sistem bonus harian oleh platform menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pola kerja tanpa batas waktu kepada driver. Banyak driver yang memiliki ambisi untuk menyelesaikan jumlah target pesanan demi mendapatkan bonus harian dalam periode waktu tertentu. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor banyaknya driver yang memilih untuk terus bekerja dari pagi bahkan hingga dini hari. Singkatnya, dibalik kemudahan yang dijanjikan oleh teknologi serta fleksibilitas dalam pekerjaan ini, terdapat dinamika kerja yang penuh tekanan dan struktural yang tidak kasatmata serta kerap luput dari perhatian masyarakat umum. Kondisi kerja ini menunjukkan bahwa fleksibilitas waktu yang dijanjikan sering kali tidak terealisasi secara nyata.

Para driver juga bekerja dalam sistem yang sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma, di mana mereka tidak memahami maupun mengetahui cara kerja algoritma tersebut. Hal ini mencakup bagaimana penilaian dari pelanggan diproses, faktor-faktor yang menentukan prioritas penerimaan order, ketidakseimbangan antara tarif dan biaya operasional, hingga risiko akun yang dapat dinonaktifkan secara sepihak. Algoritma disini merupakan sistem yang mengatur siapa, kapan, dan dalam kondisi apa aplikasi berfungsi.

Tentunya, permasalahan ini cukup krusial bagi para driver karena ketimpangan biaya yang terjadi tak jarang menimbulkan kerugian tersendiri bagi mereka. Pendapatan yang dihasilkan bahkan tergerus untuk memenuhi kebutuhan biaya harian perjalanan, karena pada dasarnya semua biaya ditanggung individu. Pengeluaran harian yakni untuk bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, kuota internet, hingga pemenuhan pangan yang akhirnya driver tidak memiliki kehidupan ekonomi yang layak untuk hidup dengan aman.

Kurangnya transparansi pada standar operasional prosedur kerja dari algoritma kepada driver juga menjadi salah satu keluhan utama. Algoritma bekerja layaknya kontrol tak kasat mata yang memengaruhi jalannya aplikasi. Driver hanya dapat mengikuti alur yang disiapkan oleh algoritma tanpa dapat menolak atau mengubah cara kerja aplikasi. Perubahan yang terjadi dalam aplikasi dapat muncul kapanpun tanpa penjelasan ataupun pemberitahuan kepada driver. Ironisnya, tak sedikit driver terjebak dalam sistem yang dikendalikan penuh oleh algoritma yang membuat tidak banyaknya pilihan selain mengikuti pola kerja yang ada.



Sistem algoritma dari berbagai platform menciptakan sistem gamifikasi atau tingkatan level. Akun driver dengan level tinggi cenderung lebih diutamakan oleh algoritma, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan order. Sebaliknya, pengemudi dengan level yang lebih rendah mengalami penurunan pendapatan karena kurangnya prioritas dari sistem. Kondisi ini memicu persaingan yang semakin ketat di antara para driver.



Sumber: Tirto.id

Sistem gamifikasi ini juga berperan sebagai alat untuk mendepolitisasi driver, yakni dengan menekankan nilai individualisme bagi driver, platform seolah-olah menciptakan narasi bahwa keberhasilan dan kegagalan driver sepenuhnya bergantung pada usaha pribadi masing-masing, atau dapat dikatakan bahwa hasil yang akan dicapai oleh driver tergantung pada performanya dan merupakan tanggung jawab pribadinya. Sementara itu, perusahaan sebagai penyedia platform melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap ketimpangan ekonomi yang dialami para driver. Melalui pendekatan ini, perusahaan penyedia platform tidak hanya mengendalikan aspek ekonomi para driver, tetapi juga membentuk cara berpikir yang menghambat munculnya solidaritas dan kesadaran kolektif di kalangan pekerja.

Saat ini, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa penghasilan menjadi driver online lebih menjanjikan karena tidak adanya waktu kerja atau mereka bisa memilih waktu kerjanya sendiri dan seringkali ditawarkannya bonus dari aplikasi. Akan tetapi, jika dibandingkan antara pendapatan driver online dengan pekerja sektor formal tentunya terdapat perbedaan yang cukup signifikan terutama dalam hal kestabilan penghasilan dan dalam perlindungan kerja yang diberikan.

Dalam sejumlah kasus, terdapat driver online yang dalam satu hari mampu memperoleh penghasilan yang tergolong cukup besar, terutama jika mereka bekerja selama 10 hingga 12 jam atau lebih, serta berhasil mencapai target bonus yang ditetapkan pada hari tersebut. Namun, penghasilan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penghasilan tetap sehari-harinya. Perharinya, jumlah pendapatan selalu mengalami perubahan yang mana bergantung pada performa harian. Ditambah pula pendapatan per harinya juga digunakan untuk pengeluaran rutin yang harus dibayarkan.

Selain itu, dengan semakin berkembangnya platform aplikasi transportasi online, semakin banyak pula sumber daya manusia yang tergabung didalamnya. Hal ini disebabkan dari rekrutmen yang dilakukan secara terus menerus dan pada akhirnya menimbulkan persaingan ketat antara satu sama lain. Persaingan ketat ini menimbulkan ambisi pada driver untuk bekerja semaksimal mungkin yakni tanpa kenal waktu agar mendapatkan penghasilan yang besar. Namun pada kenyataannya, seringkali pendapatan yang didapatkan pada hari itu tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan dan waktu yang ditempuh.

Disisi lain, beberapa pekerjaan di sektor formal yang mungkin terlihat mendapatkan penghasilan yang lebih rendah justru lebih memiliki kepastian setiap bulannya atau dapat dikatakan penghasilan yang didapatkan cenderung stabil setiap bulannya. Selain itu, penghasilan yang didapatkan juga tidak bergantung pada performa harian, yang mana besar kemungkinannya penghasilan yang didapatkan tidak akan mengalami penurunan, justru dalam bulan-bulan tertentu dimungkinkan akan mengalami kenaikan jumlah penghasilan.

Selain kepastian dalam pendapatan, pekerja sektor formal juga mendapatkan fasilitas penunjang kesejahteraan seperti BPJS Kesehatan untuk menjamin akses layanan medis dan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan terhadap risiko kerja, kecelakaan kerja, PHK, ataupun pensiun. Terdapat pula tunjangan tambahan seperti uang makan, transportasi, tunjangan keluarga atau kinerja sebagaimana kebijakan dari masing-masing perusahaan. Disamping itu, pekerja di sektor formal juga memiliki hak atas cuti tahunan serta waktu istirahat yang diatur secara jelas. Mereka juga memiliki jam kerja yang jelas dan dibatasi maksimal 8 jam per harinya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup jelas bagi para driver online. Berbeda dengan pekerja di sektor formal, mereka tidak memperoleh fasilitas penunjang seperti jaminan sosial atau perlindungan kerja. Akibatnya, seluruh risiko dan biaya harus ditanggung sendiri, termasuk ketika terjadi kecelakaan atau gangguan kesehatan karena platform tidak menyediakan jaminan apa pun.

Selain itu, pola kerja driver online yang dilakukan tanpa kenal waktu juga dapat berdampak besar pada kesehatan driver. Ketidakseimbangan antara jam kerja dan waktu istirahat membuat tubuh terus dipaksa aktif tanpa ada kesempatan untuk beristirahat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan kelelahan fisik maupun mental yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Jika hal ini tidak segera ditangani, performa kerja akan menurun dan produktivitas menjadi tidak optimal.

Gangguan kesehatan yang sering kali dirasakan oleh driver online adalah rasa nyeri pada tulang, terutama pada punggung, pinggang, tulang bagian belakang dan leher, yang mana dipicu dari duduk dalam waktu yang lama tanpa posisi ergonomis dan tanpa peregangan otot. Hal ini, juga dipengaruhi oleh jarak tempuh dan kondisi motor yang memicu terjadinya cedera pada bagian tubuh. Namun, tak jarang driver yang mengalami hal tersebut tetap menjalankan pekerjaannya dan mengabaikan tanda-tanda awal gangguan kesehatan karena merasa bahwa ada target harian yang harus dikejar sehingga enggan untuk beristirahat sejenak.

Pola kerja yang tidak kenal waktu juga membuat para driver online mengalami tekanan mental. Mereka harus terus bekerja demi mengejar target dan bonus harian, padahal penghasilannya tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini sering membuat mereka merasa stres dan khawatir. Belum lagi, ada kalanya mereka mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pelanggan, tetapi tetap harus bersikap sopan karena penilaian pelanggan berpengaruh pada performa mereka.

Driver online pada dasarnya hanya menjalin hubungan sebagai mitra dengan platform, status mereka disini bukanlah sebagai pekerja, yang mana hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak driver sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut membuat para driver berada dalam situasi yang tidak pasti, baik dari segi pendapatan maupun kelayakan kerja. Status mereka sebagai "mitra" membuat platform tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial, upah minimum, maupun tunjangan lainnya.



Sumber: Kompasiana.com

Beberapa platform penyedia transportasi online mengklaim bahwa telah menyediakan fitur perlindungan dasar untuk driver, seperti asuransi kecelakaan hingga layanan bantuan darurat. Akan tetapi pada kenyataannya masih minim perlindungan kerja yang didapatkan para driver. Selain itu, sistem kerja yang kurang transparan membuat posisi driver semakin rentan, terutama ketika akun mereka terkena suspend tanpa alasan yang jelas. Dalam situasi seperti itu, para driver juga tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi atau pembelaan diri. Karena pada dasarnya mereka hanya bekerja di bawah kendali sistem algoritma platform, termasuk pada pesanan dan sanksi yang akan diberikan kepada mereka. Sehingga masih tidak ada kepastian keamanan bagi driver dalam menjalankan pekerjaannya.

Kondisi-kondisi diatas kemudian mendorong para driver untuk melakukan aksi unjuk rasa, petisi, hingga dialog dengan pemerintah dengan tujuan menekan tanggung jawab kepada platform. Selain itu, terdapat pula upaya untuk mendorong lahirnya regulasi yang mengakui dan melindungi hak-hak pekerja di sektor gig economy. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Angkutan Umum Indonesia (SPAUI) yang mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pekerja Platform. Desakan tersebut dilakukan karena peningkatan sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan pekerja.



Sumber: Kompasiana.com

Di Indonesia, profesi sebagai driver online masih belum memiliki regulasi yang jelas, sehingga secara formal belum diakui sebagai profesi yang sah. Ketiadaan regulasi khusus menjadi penyebab utama para driver tidak dapat diangkat sebagai pekerja tetap, melainkan tetap dianggap sebagai mitra oleh perusahaan platform. Konsekuensinya, perusahaan terus menerapkan sistem kemitraan tanpa memberikan status sebagai pekerja yang disertai dengan hak-hak ketenagakerjaan.

Selama belum ada kepastian hukum yang melindungi hak-hak para driver, sistem kerja berbasis platform online berisiko menimbulkan praktik eksploitasi. Berbeda dengan Indonesia, sejumlah negara lain telah menetapkan kebijakan yang memberikan kejelasan status bagi para pekerja, sehingga mereka memiliki kepastian untuk memperoleh gaji dan tunjangan dari perusahaan.

Selain itu, Indonesia telah menandatangani kesepakatan internasional dalam forum International Labour Organization (ILO) di Jenewa yang menghasilkan konvensi tentang perlindungan pekerja platform. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan kerangka hukum yang lebih jelas untuk mengakui status kerja para driver sekaligus menjamin perlindungan hak-hak mereka, agar platform tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemberian jaminan sosial bagi driver. Pemerintah juga dapat mendorong pembentukan serikat atau asosiasi pengemudi yang sah, sehingga para driver memiliki wadah yang diakui secara hukum untuk menyuarakan kepentingan mereka. Dengan demikian, kesejahteraan dan rasa aman para driver dapat lebih terjamin.

**PENULIS:**

**AALIYAH DAVALYNN SETIAWAN**

# SUDUT PANDANG

## E-COMMERCE VS OFFLINE STORE: PERSAINGAN ATAU PELUANG USAHA?

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pola konsumsi dan perilaku berbelanja. Pembatasan aktivitas di luar rumah serta penerapan kebijakan social distancing membuat masyarakat beradaptasi dengan cara baru dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergeseran dari kebiasaan berbelanja secara langsung di toko (offline store) menuju aktivitas belanja secara daring melalui berbagai platform e-commerce yang dinilai lebih praktis dan efisien di tengah situasi pandemi.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, nilai transaksi perdagangan elektronik mengalami peningkatan, dari Rp30,9 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp77,8 triliun pada tahun 2018, atau naik sekitar 151%. Selama masa pandemi, sekitar 31% konsumen melaporkan adanya peningkatan dalam frekuensi berbelanja secara online. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa 70% konsumen kini cenderung lebih memilih berbelanja melalui platform daring dibandingkan sebelum pandemi. Kemudian, survei BPS mencatat bahwa 31% responden mengalami peningkatan belanja online selama masa COVID-19.

Meski demikian, setelah pandemi berakhir, tren belanja online tidak sepenuhnya menggantikan peran toko fisik, sebab sebagian besar konsumen diperkirakan akan mengombinasikan kedua cara belanja tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka.



Salah satu faktor yang membuat e-commerce semakin diminati adalah kemudahannya. Belanja online dapat dilakukan kapan saja tanpa harus pergi ke toko fisik sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi. Platform e-commerce juga sering memberikan diskon dan promo yang menarik, serta dapat menjangkau pasar lebih luas, dimana konsumen dari daerah terpencil pun dapat berbelanja melalui platform ini. Bagi pelaku usaha, e-commerce membuka pasar baru, termasuk ekspor. UMKM bisa menawarkan produk mereka ke pasar nasional bahkan internasional tanpa perlu membuka gerai fisik. Biaya operasional pun lebih ringan karena pengusaha bisa berjualan tanpa perlu menyewa toko dan dapat menekan biaya gaji pegawai. Selain itu, data penjualan yang tersedia memudahkan analisis usaha dan strategi pemasaran yang lebih efektif.

Walaupun e-commerce semakin digemari karena menawarkan berbagai kemudahan, namun dari sisi konsumen terdapat keterbatasan, yakni tidak dapat menilai atau mencoba produk secara langsung sebelum melakukan pembelian. Terdapat risiko barang tidak sesuai ekspektasi karena ukuran, warna, atau kualitas yang sulit dikonfirmasi secara visual. Selain itu, penipuan dan risiko keamanan data juga menjadi kekhawatiran lain dalam transaksi online. Proses pengiriman juga menambah waktu tunggu yang tidak ditemukan pada offline store. Dari sisi pelaku usaha, persaingan di platform online sangat ketat dan infrastruktur logistik menjadi suatu tantangan, terutama untuk produk yang harus segera diterima.



Sementara itu, offline store memiliki keunggulan tersendiri. Konsumen dapat menilai dan mencoba produk secara langsung, seperti memastikan ukuran pakaian atau kualitas bahan, serta dapat langsung membawa pulang barang yang dibeli tanpa harus menunggu proses pengiriman. Bertransaksi secara tatap muka juga menurunkan risiko penipuan karena adanya interaksi langsung dengan penjual. Tawar-menawar langsung juga menjadi nilai tambah bagi offline store. Namun, offline store terbatas oleh lokasi dan jam operasional serta jangkauannya kurang luas sehingga konsumen harus meluangkan waktu pergi ke toko. Antrean pembayaran dan sistem kasir offline store terkadang merepotkan bagi sebagian orang. Artinya, offline store unggul pada pengalaman belanja langsung, sementara e-commerce unggul pada fleksibilitas dan jangkauan.

## E-COMMERCE



Kehadiran e-commerce telah membawa dampak bagi ekonomi lokal dan UMKM. E-commerce menjadi peluang besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). E-commerce memungkinkan produk lokal menembus pasar global dan ekspor. Survei menunjukkan pelaku UMKM dan merek lokal menilai e-commerce memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan membuka akses ke konsumen global. Dampak nyata dari pemasaran online adalah banyak UMKM berhasil menjangkau pasar lebih luas, menarik lebih banyak konsumen, dan mengalami peningkatan keuntungan. Dengan demikian e-commerce telah menjadi motor penggerak pertumbuhan bisnis digital di Indonesia.

Di sisi lain, pergeseran belanja ke online terkadang mengurangi kunjungan ke pasar tradisional atau offline store. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa e-commerce membuat beberapa offline store, terutama sektor fashion, menjadi sepi karena konsumen lebih nyaman dan mendapatkan harga lebih murah pada platform e-commerce. Fenomena ini menuntut pelaku offline store untuk beradaptasi. Misalnya, banyak toko offline bertahan dengan menawarkan produk berkualitas tinggi dan diskon khusus untuk menarik pembeli. Secara makro, e-commerce memang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan UMKM digital, tetapi pada saat yang sama memerlukan dukungan infrastruktur seperti akses internet dan logistik yang merata agar manfaatnya juga dirasakan di daerah pelosok.

Selain itu, media sosial dan influencer kini memainkan peran kunci dalam ekosistem e-commerce Indonesia. Platform seperti Instagram, Facebook, dan terutama TikTok sudah menjadi kanal pemasaran yang dominan. Sekitar 6 dari 10 orang Indonesia pernah berbelanja melalui sesi live shopping (siaran langsung) dan sebagian besar konsumen pernah mengikuti promosi dari influencer. Format ini berhasil karena demonstrasi produk secara real-time dan endorsement dari influencer mampu membangun kepercayaan konsumen. Konsumen cenderung lebih percaya pada rekomendasi influencer dibandingkan iklan biasa. Influencer dengan audiens besar, ditambah fitur interaktif seperti sesi tanya jawab langsung, mampu mendorong pembelian secara impulsif di platform seperti TikTok Shop atau Instagram Live.

Tren terbaru menunjukkan bahwa e-commerce dan offline store bukan semata-mata hanya untuk bersaing, melainkan mampu bersinergi melalui model omnichannel. Strategi omnichannel mengintegrasikan saluran digital dan fisik agar pengalaman belanja konsumen menjadi lancar dan fleksibel. Contohnya, department store besar kini menyediakan opsi belanja online-ambil di toko (click-and-collect) serta promosi seragam di semua kanal. Dengan cara ini, konsumen dapat melihat produk secara daring, memesan melalui aplikasi, dan mengambil barang di cabang terdekat. Konsep serupa diterapkan oleh beberapa marketplace melalui gerai pop-up atau offline store sementara untuk branding. Secara umum, omnichannel memungkinkan bisnis mencapai pasar lebih luas dan meningkatkan loyalitas pelanggan.



Baik e-commerce maupun toko fisik memiliki keunggulan dan peran masing-masing dalam perekonomian. E-commerce unggul dalam memberikan kemudahan akses, promosi, dan jangkauan pasar yang luas. Sedangkan toko fisik unggul dalam pengalaman langsung dan kepercayaan pembeli. Dari segi dampak, e-commerce mendorong pertumbuhan UMKM digital sekaligus menantang eksistensi beberapa pusat belanja tradisional. Di era media sosial, influencer menguatkan ekosistem e-commerce dengan membangun kepercayaan konsumen. Secara pribadi saya berpendapat bahwa e-commerce dan toko fisik sebaiknya lebih berkolaborasi daripada bertarung habis-habisan. Dengan kolaborasi click-and-collect, pop-up store, atau strategi omnichannel, para pelaku usaha dapat menggabungkan keunggulan kedua saluran tersebut. Dalam situasi yang dinamis, sinergi antara dunia digital dan fisik justru membuka lebih banyak peluang usaha ketimbang persaingan semata.

**PENULIS:**

**RISTIANTI SIMATUPANG**



# **LPM GEMA KEADILAN**

**AKTIF, DINAMIS, KRITIS**

**Gedung Prof. Purwahid Patrik Fakultas Hukum Lt. 2**

**Jalan Prof Soedarto SH, Tembalang**

**Kota Semarang, Jawa Tengah**

**50275**